
Upaya Sekuritisasi Isu Pengungsi dan Pencari Suaka Muslim oleh Pemerintah Austria Tahun 2015-2021

I Made Krishnadyana Putra¹⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha²⁾, A. A. Ayu Intan Prameswari³⁾,

^{1,2,3)} Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji upaya sekuritisasi pemerintah Austria terhadap pengungsi Muslim dan pencari suaka pada tahun 2015 hingga 2021. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi Austria terhadap pengungsi sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan publik dan identitas budaya telah mendorong diambilnya kebijakan yang signifikan. Isu pengungsi dan pencari suaka Muslim di Austria pada awalnya tidak dianggap sebagai sebuah isu keamanan, namun pada tahun 2015 isu ini mulai dilihat oleh pemerintah sebagai sebuah isu keamanan. Hal ini menunjukkan adanya indikasi terkait perubahan sudut pandang dari masyarakat Austria dalam melihat para pengungsi dan pencari suaka Muslim sebagai sebuah ancaman keamanan. Adanya perubahan persepsi masyarakat terhadap isu merupakan hasil dari peran pemerintah dalam mensekuritisasi isu tersebut. Dengan menggunakan kerangka teori sekuritisasi, penelitian ini menyelidiki peran pemerintah sebagai aktor sekuritisasi yang menggunakan upaya 'speech act' untuk mengkonstruksikan pengungsi sebagai ancaman keamanan. Tulisan ini menyoroti titik temu antara masalah keamanan nasional dan kewajiban kemanusiaan berdasarkan Konvensi Pengungsi tahun 1951. Melalui analisis kualitatif terhadap pernyataan dan kebijakan pemerintah, penelitian ini memberikan wawasan mengenai implikasi sekuritisasi yang lebih luas terhadap persepsi publik dan pembuatan kebijakan di Austria.

Kata-kunci : Austria, Muslim, Pengungsi, Pencari Suaka, Sekuritisasi.

Abstract

This research examines the Austrian government's securitization efforts towards Muslim refugees and asylum seekers from 2015 to 2021. This research aims to see how Austria's perception of refugees as an existential threat to public security and cultural identity has prompted significant policy decisions. The issue of Muslim refugees and asylum seekers in Austria was not initially considered a security issue, but in 2015 this issue began to be seen by the government as a security issue. This shows an indication of a change in the perspective of Austrian society in viewing Muslim refugees and asylum seekers as a security threat. The change in public perception of the issue is the result of the government's role in securitizing the issue. Using a securitization theoretical framework, this research investigates the role of the government as a securitization actor who uses 'speech act' efforts to construct refugees as a security threat. This paper highlights the intersection between national security concerns and humanitarian obligations under the Refugee Convention of 1951. Through qualitative analysis of government statements and policies, this

research provides insight into the broader implications of securitization for public perception and policymaking in Austria.

Keywords : Austria, Asylum Seekers, Muslims, Refugees, Securitization.

Kontak Penulis

I Made Krishnadyana Putra

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Bangli,Bali,Indonesia, 80614

Telp: 08214496814

E-mail : imadekrishnadyanaputra@gmail.com

PENDAHULUAN

Fenomena pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu isu yang sudah berkembang dan ada sejak lama (Zulkarnain, 2017). Sejauh ini, data dari UNCHR telah menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 114 juta orang yang harus pindah ke negara lain akibat dari adanya persekusi, konflik, kekerasan dan pelanggaran HAM (UNCHR, 2022). Isu yang berkaitan dengan pengungsi dan pencari suaka ini tentunya adalah sebuah isu global, hal ini dapat dilihat dari adanya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 pada forum UNCHR yang menjelaskan bahwa setiap negara yang datang dan telah menandatangani isi pada konvensi tersebut memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat serta memberikan perlindungan bagi para pengungsi atau pencari suaka yang datang ke negara mereka. Salah satu fenomena yang mendapatkan cukup banyak perhatian berkaitan dengan isu pengungsi dan pencari suaka adalah krisis pengungsi di Eropa tahun 2015. Berdasarkan data yang telah tercatat, setidaknya ada 1,3 juta pengungsi yang datang ke wilayah Eropa pada tahun tersebut (Pew Research, 2016). Kebanyakan dari pengungsi dan pencari suaka itu berasal dari Suriah, Afghanistan, Nigeria, Pakistan, dan juga Iraq (Isabella Bobadilla). Masuknya arus gelombang pengungsi dalam jumlah yang besar ke wilayah Eropa ini tentunya berdampak cukup signifikan terhadap beberapa negara disana. Salah satunya adalah Austria, berdasarkan data yang ada, terdapat kurang lebih 180.000 pengungsi di Austria dari tahun 2014-2017 (Federal Ministry of the Interior, 2017).

Austria sendiri merupakan salah satu negara yang terkenal dengan keterbukaannya terhadap para pengungsi dan pencari suaka. Hal ini terbukti dari posisi Austria yang

merupakan salah satu negara pertama yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang kewajiban perlindungan terhadap para pengungsi. Disamping itu juga, secara historis masyarakat Muslim telah ada di Austria sejak tahun 1878 dengan adanya Kongres Berlin yang memberikan hak kepada Austria untuk menguasai provinsi Ottoman, yakni Bosnia-Hezegovina. Pada tahun-tahun selanjutnya jumlah penduduk Muslim di Austria semakin meningkat, misalnya di tahun 1969 terdapat 76,500 dan di tahun 1973 berada pada angka 227,000. Sehingga, pada jumlah penduduk Muslim di Austria hingga hari ini mencapai 8% dari populasi masyarakat Austria secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Austria telah terbiasa hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim dalam waktu yang cukup lama.

Meskipun demikian, pada saat terjadinya krisis pengungsi di Eropa tahun 2015. Pemerintah Austria nampaknya menunjukkan tindakan yang cukup agresif dan mempersulit para pengungsi dan pencari suaka Muslim yang datang ke Austria. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kebijakan keamanan Austria pada tahun 2015 hingga 2021 untuk membatasi para pengungsi, memperketat pengecekan identitas, adanya penyetoran uang, kebijakan Anti-Veiling Act, pengecekan masjid-masjid dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut tentunya memperlihatkan bahwa terdapat pergeseran sudut pandang dari pemerintah dan masyarakat Austria terhadap masyarakat Muslim. Pergeseran ini tentunya disebabkan oleh adanya upaya sekuritisasi isu yang dilakukan oleh pemerintah Austria, sehingga isu pengungsi dan pencari suaka Muslim ini dianggap sebagai sebuah ancaman keamanan.

Dalam memahami upaya sekuritisasi, penulis menggunakan referensi dari buku yang ditulis oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde yang berjudul "*Security: A New Framework for Analysis*" pada tahun 1998. Buzan menjelaskan bahwa sekuritisasi ini merupakan sebuah proses kontruksi isu dengan tujuan untuk merubah isu tersebut menjadi sebuah isu keamanan yang sangat krusial dan harus segera ditindaklanjuti (Hough et al, 2015, hal 81). Teori sekuritisasi ini juga bisa dipahami sebagai sebuah proses untuk menunjukkan adanya *referent object* dan siapa yang mengancamnya melalui penggunaan retorika, sehingga hal tersebut dapat memberikan makna khusus terhadap sebuah isu tersebut. Secara sederhananya juga, sekuritisasi ini dapat dimengerti sebagai bentuk yang lebih ekstrim dari politisasi

Proses sekuritisasi ini memiliki 3 unit analisisnya, yakni *referent object*, *securitizing actor* dan *functional actor* (Barry Buzan et al, 1998). *Referent object* ini dipahami sebagai sebuah objek yang terancam oleh suatu hal sehingga objek tersebut harus dipertahankan, misalnya seperti nilai-nilai budaya, akses ekonomi, stabilitas domestik dan lain sebagainya. *Securitizing actor* disini merupakan aktor yang mensekuritisasi sebuah isu dengan mendeklarasikan *referent object* dan hal-hal yang mengancamnya. Kemudian, *functional actors* dijelaskan sebagai aktor yang mempengaruhi dinamika suatu sektor, tanpa menjadi aktor yang menyuarakan isu keamanan atas nama *referent object*, misalnya seperti media massa. Melalui penjelasan itu, maka *securitizing actor* memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengkonstruksikan sebuah isu menjadi isu keamanan.

Sehingga, dalam upaya tersebut *securitizing actor* akan menggunakan upaya *speech act* sebagai dalam melakukan proses sekuritisasi isu. *Speech act* merupakan tindakan melalui tutur kata (argumentasi, pidato, opini publik, dan lain sebagainya) yang ditujukan untuk memberikan tanda ancaman dan *referent object*

pada sebuah isu kepada masyarakat secara luas (Angga Nurdin, 2019). *Speech act* ini nantinya akan menimbulkan adanya beberapa retorika yang merupakan sebuah ide untuk dipahami sebagai suatu permasalahan yang berdampak bagi banyak orang. Pada teori sekuritisasi ini, *speech act* digunakan untuk menyatakan gagasan tentang adanya ancaman dan konsep keamanan, dimana pelabelan suatu isu melalui penggunaan kata-kata dilakukan untuk menggiring suatu permasalahan ke ranah keamanan, sehingga dapat memberikan legitimasi kepada negara untuk menggunakan cara-cara apa saja dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Pergeseran sudut pandang dari pemerintah dan masyarakat Austria terkait isu pengungsi dan pencari suaka Muslim ketika adanya krisis pengungsi ini tentunya menunjukkan bahwa isu tersebut telah dilihat sebagai sebuah isu keamanan. Kondisi ini diakibatkan oleh adanya upaya sekuritisasi isu yang dilakukan oleh pemerintah Austria sebagai aktor sekuritisasi. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya sekuritisasi isu pengungsi dan pencari suaka Muslim yang dilakukan oleh pemerintah Austria dari tahun 2015 hingga 2021. Sehingga, dapat merubah persepsi masyarakat Austria terhadap isu pengungsi dan pencari suaka Muslim tersebut.

METODE

Dalam tulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian jenis kualitatif yang dominan digunakan dalam studi Hubungan Internasional. Menurut Neuman, penelitian jenis kualitatif ini akan menganalisis informasi yang ada dalam bentuk kata-kata, suara, gambar ataupun objek yang tidak diukur (jumlah, ukuran dan frekuensinya). Tulisan ini bisa juga dikategorikan sebagai penelitian berjenis studi kasus, dimana penulis akan meneliti sebuah fenomena, kejadian atau isu yang terjadi secara khusus (Noor, 2008). dalam penelitian ini sendiri peneliti akan menggunakan metode analisis diskursus. Metode analisis diskursus ini merupakan

sebuah metode atau teknik analisis data dengan melihat dan menganalisis penggunaan bahasa untuk menemukan tujuan dari penggunaan bahasa (kata atau kalimat) itu dalam sebuah kondisi atau fenomena (Brown, 1983).

Tulisan ini menggunakan teknik analisis diskursus, karena nantinya akan menganalisis upaya "*speech act*" atau "penggunaan bahasa" yang dilakukan oleh pemerintah Austria dalam upaya sekuritisasi terhadap isu pengungsi dan pencari suaka muslim di Austria. Sehingga, pada penelitian ini metode diskursus bertujuan untuk menganalisis berbagai kalimat, opini ataupun pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Austria terkait isu pengungsi dan pencari suaka muslim yang tentunya berimplikasi terhadap sebuah upaya sekuritisasi. Penelitian ini nantinya akan berupaya mencari penggunaan kalimat yang menggunakan kata-kata dengan konteks keamanan seperti "ancaman", "keselamatan", "terorisme", dan lain sebagainya. Dengan itu, maka tulisan ini akan dapat mengindikasikan bahwa terdapat upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait isu pengungsi dan pencari suaka muslim di Austria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dari isu pengungsi dan pencari suaka Muslim di Austria ini mulai dianggap sebagai sesuatu hal yang serius, ketika adanya '*refugee crisis*' pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik di beberapa negara Timur Tengah yang telah mendorong datangnya arus lonjakan pengungsi yang sangat besar masuk ke Eropa. Berdasarkan data dari Pew Research Center tercatat telah ada 1,3 juta pengungsi yang datang ke Eropa (Pew Research Center, 2016). Pada saat itu, Austria menjadi salah satu negara yang paling terdampak dari adanya '*refugee crisis*' ini, data menunjukkan telah ada 88,000 orang yang mengajukan suaka di Austria (Sebastian Kurz, 2018). Hal ini menyebabkan Austria menempati posisi ketiga tertinggi per kapita terkait pengajuan suaka yang kebanyakan berasal dari Afghanistan, Syria, dan Iraq.

Kondisi ini menjadi cukup krusial, karena adanya ketidakefektifan dari regulasi Dublin yang mengakibatkan adanya manajemen arus pengungsi yang lambat, sedangkan arus gelombang pengungsi tiap harinya semakin banyak. Disamping itu juga, adanya ancaman dan potensi masuknya terorisme melalui pengungsi juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah Austria untuk kemudian melakukan upaya sekuritisasi isu agar nantinya pemerintah mendapatkan justifikasi untuk menerapkan kebijakan yang agresif terhadap para pengungsi dan pencari suaka Muslim.

"Existential Threats" dan "Referent Object" pada Isu Pengungsi dan Pencari Suaka Muslim di Austria.

Meskipun masyarakat Austria telah lama berinteraksi dan hidup berdamping dengan masyarakat muslim, namun pada kenyataannya adanya penduduk muslim yang datang ke Austria ternyata memberikan rasa takut bagi masyarakat Austria itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh berbagai peristiwa dan aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok islam radikal diberbagai belahan dunia. Salah satu peristiwa yang mendapatkan cukup perhatian adalah peristiwa 9/11 yang menyebabkan negara-negara di Eropa termasuk Austria menaruh perhatian lebih terutama pada isu keamanan terhadap masyarakat muslim (Anna, 2008).

Adanya ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap penduduk Muslim ini tentunya masih terus terjadi di Austria hingga hari ini. Tidak hanya itu, pemerintah dan masyarakat Austria juga melihat isu pengungsi dan pencari suaka ini sebagai sebuah "*existential threat*", karena ada beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Eropa termasuk Austria. Di Austria sendiri terdapat sebuah kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang anak laki-laki berumur 10 tahun oleh pencari suaka dari Iraq pada 2 Desember 2015. Adanya berbagai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh beberapa pengungsi dan pencari suaka tersebut tentunya menimbulkan ketakutan tersendiri dari masyarakat dan pemerintah Austria.

Disamping itu juga, masuknya para pengungsi dan pencari suaka Muslim yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan masyarakat Austria telah menjadi ancaman tersendiri bagi identitas budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Terlebih lagi, perbedaan bahasa yang dimiliki oleh kedua masyarakat tersebut juga menjadi kendala untuk melakukan interaksi dengan lebih mudah. Perbedaan *culture identity* ini tentunya menjadi sebuah ancaman, karena telah ada pandangan atau stereotype negatif terhadap masyarakat Muslim yang dilihat sebagai sebuah kelompok yang berusaha untuk menolak peradaban Barat. Selain isu penolakan terhadap Barat dan terorisme, stigma negatif yang dibangun terhadap *culture identity* dari masyarakat Muslim di Timur Tengah tersebut berhubungan juga dengan isu radikalisme dan ekstrimis. Pemerintah dan masyarakat Austria melihat bahwa datangnya para pengungsi dan pencari suaka Muslim tersebut berpotensi untuk menyebarkan paham-paham radikal dan ekstrim kepada masyarakat Austria yang beragama Islam.

Dalam sebuah upaya sekuritisasi, '*referent object*' menjadi salah satu aspek penting dalam mengkonstruksi sebuah ancaman terhadap suatu isu tertentu. *Referent object* ini dipahami sebagai sebuah objek yang terancam oleh suatu hal sehingga objek tersebut harus dipertahankan, misalnya seperti nilai-nilai budaya, akses ekonomi, stabilitas domestik dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa ada beberapa '*existential threat*' yang menjadi alasan utama pemerintah melakukan upaya sekuritisasi isu pengungsi dan pencari suaka Muslim di Austria. Dengan mengkonstruksikan adanya sebuah ancaman yang berdampak terhadap suatu entitas objek tertentu, maka hal tersebut akan memperjelas seberapa besar dampak yang dihasilkan apabila ancaman tersebut tidak segera diantisipasi.

Di dalam teori sekuritisasi, *referent object* ini dibagi menjadi lima, yakni *economic sector*, *societal sector*, *military sector*, *environmental sector*,

dan *political sector*. Melihat kondisi yang terjadi di Austria pasca adanya "*refugee crisis*" pada tahun 2015, maka kita dapat memahami bahwa "*existential threats*" yang telah dijelaskan sebelumnya merujuk kepada sektor sosial. "*Existential threats*" seperti ancaman terorisme, radikalisme, ekstrimis, tindakan kriminal, dan perbedaan kebudayaan dapat dilihat sebagai sebuah ancaman terhadap identitas budaya yang dimiliki oleh masyarakat Austria. Datangnya para pengungsi dan pencari suaka Muslim yang memiliki *culture identity* yang berbeda dipandang sebagai sebuah ancaman yang berpotensi untuk menggeser budaya-budaya lokal yang ada di masyarakat Austria. Oleh karena itu, masyarakat Austria melihat isu pengungsi dan pencari suaka Muslim ini sebagai sebuah ancaman yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, adanya "*existential threats*" seperti ancaman terorisme, radikalisme, ekstrimis, potensi tindakan kriminal dan perbedaan budaya tentunya telah memunculkan "*referent object*" sebagai objek yang harus dilindungi dari ancaman tersebut. Pada isu pengungsi dan pencari suaka Muslim di Austria ini, "*referent object*" yang terancam oleh adanya "*existential threats*" tersebut adalah identitas budaya dari masyarakat Austria. Hal ini disebabkan, karena ancaman-ancaman yang muncul dari datangnya para pengungsi dan pencari suaka Muslim pada "*refugee crisis*" tersebut memang secara jelas mengancam keamanan masyarakat dari berbagai sektor, mulai dari keamanan, budaya dan lingkungan sosial di dalam masyarakat Austria itu sendiri.

Dengan mengkonstruksikan identitas budaya sebagai "*referent object*" dalam isu ini, maka hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran yang lebih dalam akan adanya ancaman dari isu pengungsi dan pencari suaka Muslim tersebut. Sehingga, upaya sekuritisasi yang dilakukan nantinya akan lebih mudah menarik perhatian masyarakat terkait isu yang disekuritisasi oleh pemerintah.

Speech Act” Sebagai Salah Satu Upaya Sekuritisasi Isu Pengungsi dan Pencari Suaka yang Dilakukan Oleh Pemerintah Austria 2015-2021.

Dalam teori sekuritisasi, “speech act” dipahami sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dengan memberikan sebuah pernyataan atau opini publik untuk mempengaruhi masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Dalam kaitannya dengan tulisan ini, tulisan ini akan melihat berbagai upaya “speech act” yang dilakukan oleh pemerintah Austria melalui pejabat pemerintahan dalam beberapa kesempatan pada forum resmi maupun wawancara dengan media.

Pada awal terjadinya krisis pengungsi tahun 2015 di Eropa, pemerintah Austria sempat memberikan pernyataan ketiak diwawancari oleh media Reuters. Pada 7 September 2015, Werner Faymann selaku kanselir Austria saat itu memberikan pernyataan kepada beberapa media dengan mengatakan :

“We have always said this is an emergency situation in which we must act quickly and humanely. We have helped more than 12,000 people in an acute situation.”

Sumber : Reuters, 2015

Melalui pernyataan tersebut, kita dapat memahami bahwa pemerintah Austria melihat adanya lonjakan pengungsi dari Timur Tengah yang masuk ke Eropa tersebut sebagai sebuah keadaan darurat. Dengan mengatakan bahwa fenomena datangnya pengungsi dan pencari suaka dari Timur Tengah pada 2015 ini sebagai sebuah keadaan darurat tentunya mengakibatkan masyarakat berpikir bahwa ada sesuatu hal yang berbeda dari datangnya pengungsi pada tahun tersebut.

Selanjutnya, pemerintah Austria juga melakukan upaya “speech act” melalui pernyataan dari Mentri Dalam Negeri Austria, yakni Mikl-Leitner pada 17 September 2015 ketika ia diberikan beberapa pertanyaan terkait isu pengungsi dan pencari suaka yang setiap harinya mengalami peningkatan akibat dari

krisis pengungsi. Dalam wawancara dengan media lokal Der Standard, ia menyatakan bahwa :

“Every refugee should be placed under general suspicion”. However, it can never be completely ruled out that terrorists will come to Europe as refugees.”

Sumber : Der Standard, 2015

Ini artinya “Austria terkenal dengan keterbukaannya dalam membantu sektor kemanusiaan (pengungsi), namun dikarenakan adanya serangan teroris maka setiap pengungsi harus tetap dicurigai” (Der Standard, 2015). Pernyataan dari Mentri Dalam Negeri Austria ini secara jelas menunjukkan bahwa pemerintah memang menaruh kecurigaan terhadap para pengungsi dan pencari suaka yang datang dari Timur Tengah. Hal ini disebabkan, karena ‘*refugee crisis*’ yang terjadi pada tahun 2015 itu diakibatkan oleh adanya konflik di Syria dengan kelompok teroris ISIS. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Mentri Dalam Negeri Austria tersebut tentunya memberikan dampak yang cukup besar terkait dengan bagaimana masyarakat memandang para pencari suaka dan pengungsi Muslim dari Timur Tengah.

Pernyataan dari Kanselir Austria dan Mentri Dalam Negeri telah mendorong pemerintah untuk kemudian melakukan diskusi terkait perubahan dalam undang-undang keamanan Austria. Direktur Jenderal Keamanan Masyarakat, yakni Konrad Kogler melakukan wawancara dengan media broadcaster ORF terkait perubahan tersebut. Dalam wawancara tersebut, ia menjelaskan bahwa :

“The greatest danger comes from those people who are not integrated”

Sumber : Der Standard, 2016

Pernyataan dari Kogler ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memandang orang-orang yang tidak terintegrasikan dengan Austria (para pengungsi dan pencari suaka) sebagai sebuah ancaman yang sangat membahayakan. Hal ini tentunya merupakan sebuah

pernyataan yang cukup keras mengingat posisi Kogler dalam pemerintahan adalah sebagai Direktur Jendral Keamanan Masyarakat. Melalui pernyataan tersebut, Kogler secara tidak langsung telah memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa para pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Austria tersebut sebagai ancaman yang sangat membahayakan dengan mengatakan *"the greatest danger"*.

Pernyataan dari beberapa pejabat pemerintahan tersebut tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tindakan dari pemerintah Austria. Dalam perkembangannya, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti pembatasan jumlah pengungsi sebesar 37,500 pada 2016 dan memperkuat pengecekan pada perbatasan Austria. Disamping itu juga, pemerintah pada 2016 telah merancang sub bab baru dalam Undang-Undang Keamanan Austria yang disebut *"Special Provisions for the Preservation of Public Order and the Protection of Domestic Security during the Operation of Border Controls"*. Ini menandakan bahwa pemerintah telah berfokus untuk memperkuat keamanan publik sebagai respon dari peningkatan jumlah pengungsi yang cukup signifikan.

Dalam perkembangannya, pemerintah Austria kemudian memberlakukan beberapa kebijakan yang secara agresif mengacu kepada masyarakat Muslim. Salah satunya adalah *"Anti-Veiling Act"*, kebijakan ini secara jelas melarang penggunaan cadar atau penutup wajah bagi seluruh masyarakat Austria. Meskipun dalam aturan tersebut tidak menjerumus ke salah satu kelompok, namun banyak pihak mempercayai bahwa aturan tersebut diberlakukan khusus untuk masyarakat Muslim.

Sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan, pemerintah Austria telah menerima banyak pertanyaan dan kritikan terkait perencanaan kebijakan tersebut. Menteri Luar Negeri Austria, Sebastian Kurz memberikan klarifikasi dihadap media dengan mengatakan bahwa :

"A full body veil is hindering integration," Kurz told broadcaster ORF, adding that the burqa was

"not a religious symbol but a symbol for a counter-society".

Sumber : Reuters, 2016

Pernyataan dari Sebastian Kurz tersebut secara tidak langsung telah membangun narasi bahwa penutup wajah yang menjadi ciri khas ajaran Islam telah dianggap sebagai sebuah upaya untuk menolak dan melawan budaya yang ada di dalam masyarakat Austria. Hal ini tentunya menimbulkan pandangan negatif terhadap masyarakat Muslim, karena mereka dianggap melakukan penolakan untuk terintegrasi dengan budaya Austria.

Pemerintah Austria juga sempat mengeluarkan sebuah pernyataan dalam sebuah pidato dalam sidang umum PBB pada 20 September 2017. Pada saat itu, pemerintah Austria diwakili oleh Sebastian Kurz memberikan beberapa poin terkait isu terorisme. Berdasarkan laman Kementerian Federal Austria untuk urusan Eropa, Sebastian Kurz mengatakan bahwa :

"With the success of Daesh in Iraq and Syria, radicalization and extremism sharply increased within our societies."

Sumber : Kementerian Federal Austria untuk Urusan Eropa dan Internasional, 2017

Pidato yang disampaikan oleh Sebastian Kurz itu secara jelas telah mengatakan bahwa radikalisasi dan ekstrimis itu memang telah meningkat pasca adanya konflik ISIS di Timur Tengah. Pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Austria ini tentunya semakin meningkatkan ketakutan masyarakat terhadap para pengungsi dan pencari suaka Muslim yang ada di Austria. Dengan mengatakan bahwa terdapat peningkatan terhadap radikalisasi dan gerakan ekstrimis, maka hal ini menunjukkan bahwa radikalisasi dan gerakan ekstrimis telah masuk dan berkembang dalam masyarakat Austria.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Sebastian Kurz ini kemudian mendorong adanya pengecekan di beberapa masjid di Austria untuk mengantisipasi adanya penyebaran

paham-paham radikal dan ekstrim. Melalui pengecekan tersebut, pemerintah kemudian menutup 7 masjid dan mengeluarkan beberapa imam Islam yang dianggap menyebarkan ajaran-ajaran yang berpotensi menimbulkan aksi radikalisme dikalangan masyarakat.

Selanjutnya, pada tahun 2021 pemerintah Austria berencana mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menolak arus gelombang pengungsi dari Afghanistan saat itu. Pengungsi dari Afghanistan ini diprediksi akan memasuki wilayah Eropa dan Austria, karena kelompok Taliban telah menguasai pemerintahan Afghanistan saat itu. Sebastian Kurz yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kanselir Austria memberikan pernyataan terkait kebijakan tersebut dihadapan media. Sebastian Kurz menjelaskan bahwa :

“Controlling immigration is integral to protecting his country’s cultural identity and has made hard-line immigration policies a cornerstone of his chancellorship. Even as the Taliban entered Kabul, Kurz refused to soften Austria’s stance saying, “We have to deport as long as possible.”

Sumber : Politico, 2021

Melalui pernyataan tersebut, pemerintah sekali lagi menggunakan upaya ‘*speech act*’ dengan mengatakan bahwa kontrol terhadap imigrasi ini dilakukan sebagai wujud dari perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat Austria. Disamping itu, pemerintah juga mengatakan bahwa mereka akan mendeportasi secepatnya para pengungsi tersebut. Pernyataan ini tentunya bertujuan agar masyarakat melihat isu pengungsi dan pencari suaka Muslim dari Afghanistan ini sebagai sebuah ancaman terhadap identitas budaya mereka. Hal ini cukup berbeda dari pernyataan-pernyataan pemerintah sebelumnya yang berfokus terhadap ancaman keamanan publik Austria. Dengan mengatakan bahwa penerimaan pengungsi Afghanistan ini dapat mengancam identitas budaya, maka secara tidak langsung masyarakat akan memandang pengungsi muslim tidak hanya mengancam keamanan

publik mereka tetapi juga keamanan identitas budaya masyarakat.

PENUTUP

Krisis Pengungsi yang terjadi di Eropa pada tahun 2015 telah menyebabkan munculnya berbagai permasalahan di beberapa negara. Salah satu negara yang terdampak oleh adanya krisis pengungsi tersebut adalah Austria. Negara-negara di Eropa, termasuk Austria sejak dahulu terkenal akan keterbukaan dan penerimaan mereka terhadap para pengungsi dari berbagai penjuru dunia dengan alasan kemanusiaan. Austria sendiri merupakan salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 terkait kewajiban negara dan hak-hak terhadap para pengungsi. Meskipun demikian, pemerintah Austria pada saat krisis pengungsi tersebut nampaknya berupaya untuk melakukan upaya sekuritisasi terhadap isu pengungsi dan pencari suaka Muslim pada saat itu.

Kondisi tersebut tentunya disebabkan oleh adanya “*existential threats*” dan “*referent object*” yang muncul pada isu pengungsi dan pencari suaka Muslim ini di Austria. Pemerintah Austria melihat adanya beberapa “*existential threats*” yang dapat mengancam keamanan domestik Austria, seperti ancaman terorisme, tindakan kriminal, radikalisme, ekstrimisme, dan perbedaan kebudayaan. Sedangkan, “*referent object*” yang harus dilindungi oleh ancaman tersebut adalah identitas budaya yang dimiliki oleh masyarakat Austria sendiri. Dalam upaya sekuritisasi tersebut, pemerintah Austria melakukan beberapa upaya “*speech act*” yang dilakukan sejak 2015 hingga 2021. Pemerintah Austria dalam beberapa kesempatan telah memberikan berbagai pernyataan yang berkaitan dengan adanya situasi darurat, ancaman terorisme, peningkatan radikalisme, adanya upaya *counter-society* dan ancaman terhadap identitas budaya mereka.

Daftar Pustaka

- Gerhard Muzak. (2021). The Austrian Migration and Asylum Law under the Impact of the European Migration Crisis 2015. *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*. <https://doi.org/10.25365/vlr-2020-4-1-138>. Diakses pada 11 September 2023.
- Buzan, B., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder, Colo.: Lynne Rienner Pub.
- Hough, P., Malik, S., Moran, A., & Pilbeam, B. (2015). *International Security Studies*. Routledge.
- Zulkarnain. (2017). Pengungsi Dalam Perspektif Hubungan Internasional PENGUNGI DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL.
- Cindy, P., Queenelya, R., Putra Suwecawangsa, A., Wayan, N., & Priadarsini, R. (n.d.). ALASAN AUSTRIA MENGELUARKAN KEBIJAKAN ANTI-FACE-VEILING ACT PADA TAHUN 2017.
- Kurz: Austria won't take in any more Afghan refugees. (2021, August 22). POLITICO. <https://www.politico.eu/article/sebastian-kurz-austria-pm-wont-take-in-any-more-afghanistan-refugees-taliban/>. Diakses pada 10 September 2023.
- Refugee Crisis in Europe: Aid, Statistics and News | USA for UNHCR. (n.d.). <https://www.unrefugees.org/emergencie/s/europe/>. Diakses pada 10 September 2023.
- Asyl. (n.d.). www.bmi.gv.at. Retrieved March 27, 2024, from <http://www.bmi.gv.at/301>
- Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung), B. (2015). Verfassungsschutzbericht 2015, http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Verfassungsschutz/Verfassungsschutzbericht_2015.pdf. Diakses pada 20 Mei 2024
- DW. (2016, February 24). *Austria not waiting – DW – 02/24/2016*. Dw.com. <https://www.dw.com/en/austria-not-waiting-for-a-european-solution/a-19071556>. Diakses pada 15 Mei 2024.
- Kurz, S. (2017, December 18). *Only By Regaining Control Can We Solve the Migration and Refugee Crisis*. Time Magazine. <https://time.com/5068561/sebastian-kurz-austria-chancellor-migrant-crisis/>. Diakses pada 1 Mei 2024.
- Kurz: Austria won't take in any more Afghan refugees. (2021, August 22). POLITICO. <https://www.politico.eu/article/sebastian-kurz-austria-pm-wont-take-in-any-more-afghanistan-refugees-taliban/>. Diakses pada 15 Mei 2024.
- Niesner, L. (n.d.). *Austria's Kurz says he opposes taking in any more Afghans*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/europe/austrias-kurz-says-he-opposes-taking-any-more-afghans-2021-08-22/>. Diakses pada 1 Mei 2024.
- Österreich, A. der R. (2017, September 20). *Rede von Außenminister Sebastian Kurz anlässlich der UN-Generalversammlung in New York (Englisch)*. [www.bmeia.gv.at](https://www.bmeia.gv.at/ministerium/presse/reden/2017/09/rede-von-aussenminister-sebastian-kurz-anlaesslich-der-un-generalversammlung-in-new-york-englisch). <https://www.bmeia.gv.at/ministerium/presse/reden/2017/09/rede-von-aussenminister-sebastian-kurz-anlaesslich-der-un-generalversammlung-in-new-york-englisch>. Diakses pada 15 Mei 2024.
- Pew Research Center. (2016, August 2). *Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015*. Pew Research Center's Global Attitudes Project; Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/global/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-in-2015/>. Diakses pada 10 Mei 2024.
- Reuters. (2015, September 7). *Austria plans to end measures allowing migrants from Hungary and move "towards normality."* <https://www.reuters.com/article/idUSKCN0R40FN/>. Diakses 15 Mei 2024.

Reuters. (2016, August 18). *Austrian politicians call for a ban on full body veil*. <https://www.reuters.com/article/idUSKC N10T1JU/>. Diakses pada 15 Mei 2024.

Standard, D. (2015a, November 17). *Staatsschutzgesetz: Mikl-Leitner will SPÖ-Bedenken ausräumen*. DER STANDARD. <https://www.derstandard.at/story/2000025882051/mikl-leitner-will-bedenken-der-spo-e-ausraeumen>. Diakses 15 Mei 2024.

Standard, D. (2016, February 7). *Generaldirektor Kogler verteidigt Staatsschutzgesetz*. DER STANDARD. <https://www.derstandard.at/story/2000030529821/generaldirektor-fuer-oeffentliche-sicherheit-verteidigt-staatsschutzgesetz>. Diakses 15 Mei 2024.

Statista. (2017). *Austria: grants of asylum 2008-2016*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/550038/number-of-refugees-accepted-in-austria/#:~:text=Number%20of%20accepted%20grants%20of%20asylum%20in%20Austria%20from%202008%2D2017&text=This%20statistic%20shows%20the%20annual>. Diakses pada 1 Mei 2024.

UNHCR. (2022). *Refugee Statistics | USA for UNHCR*. Unrefugees.org. <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/statistics/>. Diakses pada 17 April 2024.